

PENGAWASAN INFRASTRUKTUR JALAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) DI KABUPATEN BONE

Fatimah^{1*}, Sudarmi², Muhammad Yusuf³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This study purposed to determine how preventive supervision in road infrastructure and repressive supervision in infrastructure at the Public Works and Spatial Planning Office in Bone Regency. This study usesd descriptive qualitative research. The number of informants in this study amounted to 12 people. Data collection techniques were observation, interviews, and documentation. The results showed that preventive supervision on road infrastructure development in Bone Regency had been maximal, because the Public Works agency had supervised activity planning in accordance with implementation / planning standards with good cooperation with consultants / service providers, but on repressive supervision of development. road infrastructure in Bone Regency had not been maximal, because when doing the inspection the problem was not punc, this was because there was missing in data collection which was used as the main basis for conducting inspections, then in conducting supervision with each of their duties. according to the field, the problem was the distance to an area was very far so it took a long time.

Keywords: *supervision, road infrastructure, public works and spatial planning*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengawasan preventif dalam infrastruktur jalan dan pengawasan represif dalam infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Bone . Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskripsi Kualitatif. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah 12 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengawasan preventif pada pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Bone sudah dikatakan maksimal, karena dinas PU sudah melakukan pengawasan perencanaan kegiatan sesuai dengan standar pelaksanaan/ perencanaan dengan adanya kerja sama yang baik dengan konsultan/ penyedia barang jasa, namun pada pengawasan represif pada pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Bone belum dikatakan maksimal, karena dimana pada saat melakukan pemeriksaan yang menjadi kendala yaitu tidak tepat waktu, hal tersebut disebabkan karena ada keterlambatan pengumpulan data yang dijadikan sebagai dasar utama dalam melakukan pemeriksaan, kemudian dalam melakukan pengawasan dengan masing- masing tugasnya/ sesuai dengan bidangnya, yang menjadi masalah yaitu jarak tempuh daerah yang sangat jauh sehingga membutuhkan waktu yang lama.

Kata Kunci: *pengawasan, infrastruktur jalan, pekerjaan umum dan penataan ruang*

* fatimah@gmail.com

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bertanggung jawab terhadap pengawasan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat, kemudian mengupayakan peningkatan yang dapat menguntungkan. Untuk mencapai berbagai sasaran dan tujuan pembangunan infrastruktur secara efisien dan efektif, perlu dilakukan system perencanaan yang baik serta diperlukan system pelaksanaan dan pengawasan yang bagus dan mampu menjamin efisiensi dan efektifitas penerapan sasaran dan tujuan pembangunan yang direncanakan system pelaksanaan tersebut bersama system perencanaan dan pengawasan merupakan salah satu bagian dari system manajemen pembangunan yang dijadikan wahana dalam pencapaian berbagai sasaran dan tujuan pembangunan nasional.

Pembangunan tidak hanya dapat memberikan dampak yang besar, tetapi pembangunan itu juga dapat menciptakan kerusakan terhadap suatu kawasan atau wilayah serta berbagai factor pembangunan dan factor keadaan wilayah.

Selain itu, keterlibatan dalam pembangunan infrastruktur berdampak terhadap pekerjaan umum yang melibatkan masyarakat sebaiknya berawal sejak dilakukan perencanaan awal pembangunan pada wilayah yang akan dibangun tersebut. Masyarakat setempat harus dilibatkan pada setiap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur serta upaya penanggulangan yang berdampak merugikan, seharusnya pemerintah daerah yang dapat bertanggung jawab secara langsung terhadap pengawasan pelaksanaan keterlibatan masyarakat, maupun upaya peningkatan dampak yang menguntungkan.

Untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan pembangunan yang secara efektif dan efisien, perlu diberlakukan system perencanaan yang baik juga diperlakukan system perencanaan yang baik serta diperlukan system pelaksanaan dan pengawasan yang baik dan mampu menjamin efisiensi dan efektifitas pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan yang direncanakan.

Infrastruktur jalan kota Bone banyak yang mengalami kerusakan, bahkan jalan dalam kota pun banyak yang rusak. Jalanan rusak jika musim hujan tiba sehingga banyak masyarakat

yang mengeluh. Sementara jalanan penghubung antar kota Bone keluar daerah juga mengalami rusak yang mengakibatkan kecelakaan biasa terjadi. Makanya sangat diperlukan pengawasan agar dalam mengerjakan suatu rencana terealisasi dengan baik, apalagi rencana yang dilakukan membangun infrastruktur jalan yang dimana nantinya sangat dibutuhkan oleh semua kalangan masyarakat.

Sementara itu pelaksanaan pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur jalan bisa dikatakan sukses atau gagal suatu kegiatan tergantung pada mutu pelaksanaan administrasi pemerintahan kabupaten dan seberapa besar kebijakan tersebut dapat diformulasikan berdasarkan sumber-sumber yang tersedia, serta meningkatkan kualitas pengawasan administrasi pemerintah kabupaten dapat ditingkatkan dengan dampak terhadap responsif tuntutan masyarakat. (<http://jdih.bone.go.id>).

Adapun penundaan pemekaran Bone Selatan lebih ditetapkannya pada MORATORIUM pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) pada tahun 2012. Kemudian dengan adanya pemekaran di khawatirkan hanya akan menjadi alat untuk memenuhi berbagai kepentingan para penguasa yang sejak awal memang telah merencanakan adanya pemekaran

wilayah Bone Selatan. Serta Euforia semangat memekarkan wilayah menjadi daerah otonomi saat ini lebih didasarkan pada pendekatan politis, yaitu tingginya semangat terhadap perbutan wilayah kekuasaan oleh elit- elit politik local, dan menjadi arena baru dalam melakukan kontestasi elit. Yang sering sekali mengabaikan tujuan pemekaran substansi, yaitu dapat mempermudah akses masyarakat terhadap pemerintah dan mengoptimalkan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat. Akan tetapi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone juga tetap berkomitmen untuk memperjuangkan mengenai pemekaran di Bone Selatan sesuai dengan aturan perundang- undangan yang berlaku. (Bone.go.id).

Dengan adanya pengawasan juga dapat mencegah suatu tindakan penyimpangan dalam melaksanakan suatu pekerjaan yang telah direncanakan, akan tetapi yang terjadi pada saat ini tindakan pengawasan sangatlah kurang dijalankan dan sering menyebabkan terjadinya penyimpangan. Di dalam melaksanakan pengawasan tidak hanya mengikuti langkah- langkah seperti; menetapkan standar, memberikan penilaian dan melakukan tindakan penilaian, akan tetapi sifat dan waktu dalam pengawasan juga perlu diterapkan agar pelaksanaan

pengawasan tersebut berjalan dengan baik.

Menurut Lutfi (2017) dalam penelitiannya yang berjudul "kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga dalam pengembangan Tata Ruang Wilayah tahun 2016 (studi kasus: Taman Tingkir Kota Salatiga). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini telah memberikan pelayanan baik kepada masyarakat dilihat dari kepuasan masyarakat terhadap adanya Taman Tingkir di Kota Salatiga. Rata-rata rentang kepuasan yang ditunjukkan oleh masyarakat berada di 80,0% dimana rata-rata tersebut masuk dalam kategori "sangat setuju". Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa masyarakat banyak yang puas dengan adanya taman kota. Melalui pengukuran kinerja dari hasil yang dicapai sesuai dengan sasaran yang ditetapkan agar terlihat sejauhmana pelaksanaan kerjanya. Masyarakat terlibat dalam pelaksanaan sampai saat ini dan merasa banyak keuntungan dari Taman Kota ini. Tetapi dari hasil yang ada Taman Tingkir masih ada kekurangannya, dari fasilitas umum yang tidak terawat dengan baik menjadikan fasilitas umum seperti: permainan anak-anak, tempat sampah, ubin sudah sebagian rusak.

Dan banyak alih fungsi lahan, dari trotoar dan sebagian jalan menjadi pedang kaki lima ini yang menjadikan kekurangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga dalam pelaksanaan evaluasi. Dalam hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masuk dalam kategori bagus, perbandingannya adalah hasil data primer masyarakat berkaitan dengan kepuasan Taman Tingkir dan hasil wawancara dengan informan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Menurut Suhanda (2016) dalam penelitiannya yang berjudul "peranan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mesuji dalam pembangunan infrastruktur jalan (studi di Kecamatan Tanjung Raya)." Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa diperoleh penyusunan kebijakan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mesuji dimulai dari kegiatan Muasyawah Renacana Pembangunan (Muserbang) masih kurang sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat. Penyusunan program pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mesuji telah dilakukan berdasarkan tujuan pembangunan infrastruktur dengan mempunyai peran yang sangat penting

dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar rakyat, namun dalam pelaksanaan infrastruktur masih kurang maksimal. Misalnya program perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan yang belum menyeluruh disetiap kecamatan yang ada di Kabupaten mesuji. Penyusunan biaya/penyusunan anggaran dalam proses pembangunan infrastruktur mengalami beberapa kendala, seperti adanya kekurangan anggaran sebesar Rp 3,1 milyar dari jumlah anggaran Rp 256 milyar yang telah ditentukan.

Menurut Hidayat (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “kinerja dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam penanggulangan banjir dan genangan di Kota Surakarta.” Hasil penelitian ini menunjukkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada aspek responsivitas serta memiliki daya tanggap terhadap laporan/keluhan masyarakat terkait drainase penanggulangan bencana banjir, daya tanggap terhadap penanggulangan bencana banjir yang terjadi, serta daya tanggap dalam pemenuhan aspirasi dan harapan masyarakat yang cukup baik. Pada aspek responsibilitas penanggulangan, terdapat adanya kesesuaian antara landasan hukum dengan program kerja yang dijalankan oleh Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang. Pada aspek akuntabilitas kepada pejabat publik terkait program tersebut sudah dilakukan dengan maksimal, akan tetapi pertanggungjawaban kepada masyarakat masih kurang sehingga masyarakat masih belum mengetahui tugas dan program penanggulangan banjir dan genangan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Kesimpulan penelitian ini terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada aspek responsivitas dan akuntabilitas sudah cukup maksimal, pada aspek responsibilitas sudah membaik.

Pengawasan adalah suatu kegiatan administrasi yang bertujuan mengandalkan evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah diselesaikan apakah sesuai dengan perencanaan atau tidak sesuai. Karena itu tidaklah dimaksudkan untuk mengetahui siapa yang salah satu yang benar tetapi lebih diarahkan kepada upaya untuk melakukan koreksi terhadap hasil kegiatan.

Menurut Bernard (dalam Efendi 1996: 39) mengatakan bahwa pengawasan adalah proses pengecekan rencana dan pelurusan penyimpangan dari arah yang telah direncanakan suatu aktivitas yang berkesinambungan.

Menurut Koontz (dalam Efendi 2014:3) Pengawasan adalah suatu alat ukur dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar-rencana- rencana yang telah diselenggarakan untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggara.

Menurut Terry (dalam Hasibuan 2009:21) Pengawasan dapat didefenisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai standar, apa yang sedang dilaksanakam yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melaksanagn perbaikan- perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan perencanaan yaitu selaras dengan standar.

Menurut Odgers (dalam Sukoco 2011:129) tujuan pengawassn adalah:1) Meningkatkan suatu kinerja organisasi secara kontinu, karena dalam kondisi persaingan usaha yang semakin tinggi menuntut organisasi untuk setiap saat selalu mengawasi kinerjanya. 2) Meningkatkan efesiensi dan keuntungan bagi setiap organisasi dengan menghilangkan pekerjaan yang tidak perlu atau dapat mengurangi penyalahgunaan alat atau bahan. 3) Menilai derajat pencapaian suatu perencanaan kerja dengan hasil aktual yang dicapai, dan dapat dipakai sebagai suatu dasar pemberian kompensasi bagi seorang pegawai. 4) Mengoordinasikan

beberapa elemen tugas atau program yang dijalankan. 5) Meningkatkan keterkaitan terhadap tujuan organisasi agar tercapai.

Menurut Bohari (1992: 25) jenis-jenis pengawasan adalah sebagai berikut. 1) Pengawasasan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan- penyimpangan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Pengawasan preventif ini juga biasanya terbentuk prosedur- prosedur yang harus ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan. 2) Pengawasan represif ini dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan dengan membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang direncanakan. Pengawasan ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah kegiatan dan pembiayaan yang telah dilakukan ini telah mengikuti kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Menurut Quible (dalam Sukoco 2011:130) manfaat pengawasan antara lain: 1) Membantu mengoptimalkan keuntungan yang akan diperoleh suatu organisasi. 2) Membantu pegawai dalam meningkatkan hasil produktivitas karena kesadaran akan sangat berpengaruh terhadap kualitas dan kontitas output yang dibutuhkan. 3) Menyediakan alat ukur terhadap produktivitas pegawai atau suatu aktivitas yang berperan objektif bagi

organisasi. 4) Mengidentifikasi dengan adanya beberapa hal yang membuat suatu rencana tidak sesuai dengan hasil aktual yang dicapai, serta memfasilitasi pendidikannya. 5) Membantu dalam pencapaian kerja sesuai tingkat atau deadline yang ditetapkan.

METODE PENELITIAN

Waktu dalam penelitian ini akan direncanakan selama dua bulan setelah seminar proposal mengenai Pengawasan Infrastruktur Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Bone. Yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif, dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah yang sedang diteliti, mengidentifikasi serta menjelaskan data yang ada secara sistematis. Menggunakan tipe penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau mengetahui apa-apa saja yang saat ini berlaku yang didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, dan menganalisis serta menginterpretasikan kondisi-kondisi yang saat ini terjadi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 3 cara yaitu: pertama teknik observasi, teknik wawancara, ketiga teknik dokumentasi, sedangkan teknik pengabsahan data terdiri: triangulasi sumber, triangulasi teknik,

dan triangulasi waktu. Teknik analisis data sebagai berikut: (1) Reduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal yang pokok, lebih fokus pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan polanya. (2) Penyajian data dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya. (3) Penarikan kesimpulan menarik hal-hal pokok atau penting yang menjadi hasil dari penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara geografis, wilayah Kabupaten Bone terletak dibagian Timur Provinsi Sulawesi Selatan dan bagian Barat Teluk Bone dengan potensi sumberdaya alam yang cukup menjajikan untuk dikembangkan, disamping memiliki luas wilayah yang relatif luas. Kabupaten Bone secara astronomis terletak $04^{\circ}13'$ sampai $05^{\circ}06'$ Lintang Selatan (LS) dan $119^{\circ}42'$ sampai $120^{\circ}40'$ Bujur Timur (BT).

Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone yang mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan bidang lingkungan hidup melalui beberapa perumusan

kebijakan teknis, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan bisa marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan tata perkotaan, air bersih, sanitasi dan drainase, pertamanan, kebersihan serta pembinaan jasa konstruksi serta berbagai tugas lain yang telah diberikan oleh Bupati sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yang berlokasi di Jl. Laksamana Yos Sudarso Watampone, Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Sulawesi-Selatan, kode pos 92715.

Sumber daya manusia merupakan aspek yang memiliki peranan penting dalam perkembangan suatu organisasi, karena hal ini merupakan faktor penentu dalam pengambilan keputusan yang menentukan arah organisasi tersebut. Begitu juga dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Bone yang mempunyai sumber daya manusia dalam mencapai kinerja yang sesuai dengan harapan masyarakat, salah satunya adalah di bidang pengelolaan sampah.

Pada sub bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian tentang hal yang berkaitan dengan pengawasan Infrastruktur Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Bone. Dalam pencapaian pembangunan infrastruktur jalan maka diperlukan adanya pengawasan

infrastruktur dari Inspektorat dan Dinas Pekerjaan Umum tersebut.

Pengawasan berkaitan dengan proses dalam penetapan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga pengawasan yang diberikan dalam pembangunan infrastruktur harus maksimal agar pembangunan infrastruktur jalan sesuai dengan rencana pelaksanaan sebelumnya dan sesuai dengan keinginan masyarakat.

Standar operasional prosedur (SOP) merupakan bagian yang harus ada pada setiap lembaga organisasi dalam melaksanakan dan mengatur kelancaran dari suatu program atau kegiatan. Seperti halnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone, terdapat SOP pada Bidang pemeliharaan jalan dan jembatan yang apabila SOP Pengawasan Pekerjaan Jalan tidak berjalan dengan baik, maka akan menghambat Proses pemeliharaan jalan.

Menurut Bohari (1992: 25) penulis akan memaparkan hasil penelitian tentang hal yang berkaitan dengan pengawasan Infrastruktur Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Bone. Dalam pencapaian pembangunan infrastruktur jalan maka diperlukan adanya

pengawasan infrastruktur dari Inspektorat dan Dinas Pekerjaan Umum tersebut.

Pengawasan berkaitan dengan proses dalam penetapan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga pengawasan yang diberikan dalam pembangunan infrastruktur harus maksimal agar pembangunan infrastruktur jalan sesuai dengan rencana pelaksanaan sebelumnya dan sesuai dengan keinginan masyarakat.

Untuk melihat tingkat Pengawasan Infrastruktur Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Bone, penulis menggunakan dua indikator pengawasan menurut Bohari (1992:25), yaitu:

Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan- penyimpangan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Pengawasan preventif ini dilakukan untuk menjaga suatu kewenangan antara pemerintah dan daerah- daerah yang tidak berbenturan. Pemerintah menentukan beberapa cara atau suatu bentuk pengawasan preventif terhadap

suatu penyelenggaraan kewenangan daerah dalam mengatur urusan pemerintah tertentu, agar dapat terjadi suatu ketertiban dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah antara pemerintah serta daerah- daerah otonom.

Dalam mengukur pengawasan preventif terhadap infrastruktur jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Bone dalam hal ini yang perlu diketahui adalah apakah dalam pengawasan preventif dapat mencapai target pelaksanaan kerja dalam hal pengawasan yang dicapai telah sesuai dengan rencana yang telah direncanakan sebelumnya.

Berdasarkan hasil kesimpulan dari beberapa informan dapat dikatakan bahwa dalam pengawasan sebelum melaksanakan pembangunan itu ada beberapa tahapan, hasil musrembang tingkat kecamatan, hasil musrembang tingkat kecamatan, tahapan rencana umum pengadaan (RUP), persetujuan DPRD, sistem pengadaan barang jasa, pengadaan barang jasa, penyedia jasa. Setelah dilakukan berbagai tahapan tersebut terlaksana maka sistem pengawasan sudah dapat dilaksanakan. Serta dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan jalan setiap tahun sudah terdapat anggaran biaya dimana yang

terlibat adalah Dinas Pekerjaan Umum yang melaksanakan tugasnya seperti menyediakan biaya dimana biaya tersebut digunakan untuk pembangunan jalan di Kabupaten Bone. Biayanya itu diserahkan kepada kontraktor yang melaksanakan pekerjaan jalan sebagai bentuk pengawasan terhadap proyek jalan yang sedang berjalan. Mengenai pelaksanaan anggaran pembangunan dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Penelitian yang dilakukan di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengatakan terkait pengawasan pekerjaan pembangunan sebelum diadakan kegiatan, ternyata dalam melakukan pemeriksaan terhadap penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan oleh Dinas PU sudah efektif di karenakan pemerintah dinas PU sudah melakukan perencanaan kegiatan sesuai dengan standar pelaksanaan/ perencanaan dengan adanya kerja sama dengan konsultan/ penyedia barang jasa, kontraktor sudah maksimal.

Pengawasan Represif

Pengawasan represif ini dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan dengan membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang direncanakan yang bertujuan untuk mengetahui apakah kegiatan dan

pembiayaan yang telah dilakukan tersebut sudah mengikuti kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Teknik pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan dapat dilakukan dengan berbagai macam teknik, semuanya tergantung pada berbagai kondisi dan situasi yang akan terjadi, maupun yang sedang terjadi/ berkembang pada masing- masing organisasi. Penentuan salah satu teknik pengawasan ini adalah agar dapat dilakukan perbaikan- perbaikan pada tindakan yang telah dilakukan atau agar penyimpangan yang telah terjadi tidak berdampak lebih buruk, selain itu agar dapat ditentukan tindakan- tindakan masa depan yang harus dilakukan oleh suatu organisasi.

Berdasarkan hasil kesimpulan dari beberapa informan bahwa dalam melaksanakan pemantauan rutin jalan tidak optimal dan seharusnya dari pihak kontraktor melakukan pemantauan setiap hari dan dari pihak pekerjaan umum tiga kali dalam seminggu, hal tersebut sangat mengakibatkan alat- alat yang digunakan biasa mengalami kerusakan serta ditambah lagi faktor cuaca yang tidak menentu sehingga dalam pengaspalan jalan terkendala. Dimana yang seharusnya dilakukan pengawas lapangan dan konsultan pengawas dalam hal- hal laporan-

laporan pengawasan dilakukan dengan beberapa cara yaitu dilakukan serah terima lapangan dari pihak proyek kepihak rekanan serta kemudian pemeriksaan kondisi awal yang terdapat dilapangan akan dibuatkan sebuah laporan pengawasan proyek jalan dimana terdapat suatu laporan yang dibuat diawasi oleh pengawas lapangan dan konsultan yang dimana setiap bulannya melaporkan hasil pekerjaannya melalui tim serah terima.

Penelitian yang dilakukan pada kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengatakan terkait pengawasan pekerjaan pembangunan setelah diadakan kegiatan, ternyata masih terdapat penyimpangan dalam melaksanakan monitoring dimana pada saat melakukan pemeriksaan yang menjadi kendala yaitu tidak tepat waktu, hal tersebut disebabkan karena ada keterlambatan pengumpulan data yang dijadikan sebagai dasar utama dalam melakukan pemeriksaan, kemudian dalam melakukan pengawasan dengan masing- masing tugasnya/ sesuai dengan bidangnya, yang menjadi masalah yaitu jarak tempuh daerah yang juga sangat jauh sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk dapat dijangkau. Dengan demikian bahwa sistem pemeriksaan atau pengawasan setelah kegiatan

dilaksanakan yang selama ini dilakukan belum maksimal, karena dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah belum mampu mengungkap kondisi yang sering kali terjadi.

KESIMPULAN

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan infrastruktur jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Bone. Sehingga untuk mengetahui pengawasan tersebut, dilakukan penilaian pengawasan yang menggunakan dua indikator, yang merupakan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan hal- hal sebagai berikut: 1) Pengawasan preventif, Pengawasan preventif pada pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Bone sudah dikatakan maksimal, karena dinas PU sudah melakukan pengawasan perencanaan kegiatan sesuai dengan standar pelaksanaan/ perencanaan dengan adanya kerja sama yang baik dengan konsultan/ penyedia barang jasa. 2) Pengawasan represif Pengawasan represif pada pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Bone belum dikatakan maksimal, karena dimana pada saat melakukan

pemeriksaan yang menjadi kendala yaitu tidak tepat waktu, hal tersebut disebabkan karena ada keterlambatan pengumpulan data yang dijadikan sebagai dasar utama dalam melakukan pemeriksaan, kemudian dalam melakukan pengawasan dengan masing-masing tugasnya/ sesuai dengan bidangnya, yang menjadi masalah yaitu jarak tempuh daerah yang juga sangat jauh sehingga sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk dapat dijangkau.

infrastruktur jalanstudi di Kecamatan Tanjung Raya. Skripsi.

Sukoco. (2011). *Manajemen Administrasi Perkantoran Modern*. Jakarta: Erlangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Bohari. (1992). *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Effendy. (2014). *Sistem Informasi manajemen*. Bandung: Mandar Maju.
- Hasibuan. (2009). *Manajemen Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hidayat, R. (2017). *Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Penanggulangan Banjir dan Genangan di Kota Surakarta*: Journal.
- Tinjauan infrastruktur jalan dan jembatan, ini penekanan Bupati Bone.<https://radarbone.fajar.co.id>. Diakses 3 Januari 2020, pukul 15:50.
- Ketika pemekaran bone selatan di gantung. <https://bone.go.id>. Diakses 21 Januari, pukul 12: 45.
- Luthfi, A.(2016). *Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata RuangKota Salatiga dalam Pengembangan Tata Ruang Wilayah Tahun 2016*: Journal.
- Suhanda, F.(2016). *Peranan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mesuji dalam pembangunan*